

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN  
ADMINISTRATOR SECARA JARAK JAUH DI KEMENTERIAN KEUANGAN**  
*IMPLEMENTATION OF REMOTE ADMINISTRATOR LEADERSHIP TRAINING  
POLICY IN THE MINISTRY OF FINANCE*

**Agus Suharsono**

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Jalan Solo Km. 11, Cupuwatu, Purwomartani, Kalasan,  
Sleman, D.I Yogyakarta, Indonesia  
e-mail: [gusharpramudito@gmail.com](mailto:gusharpramudito@gmail.com)

Diserahkan: 06/03/2021; Diperbaiki: 11/04/2021; Disetujui: 12/05/2021

DOI: 10.47441/jkp.v16i1.150

**Abstrak**

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kinerja kepemimpinan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Nomor KEP-82/PP/2020, BPPK dapat melakukan pelatihan jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PKA secara jarak jauh di Kementerian Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada 26 responden peserta PKA dari berbagai daerah (zona waktu berbeda), kemudian dianalisis secara logika-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelajaran daring membuat proses belajar lebih produktif karena kegiatan belajarnya bervariasi dan terdokumentasi, waktu dan tempat yang fleksibel, alokasi anggaran jauh lebih rendah dibandingkan pembelajaran tatap muka. Akan tetapi terdapat juga beberapa kelemahan antara lain minimnya interaksi sosial antar peserta, gangguan yang bisa terjadi akibat tidak stabilnya jaringan internet, serta peserta merasa lelah karena harus duduk dan menatap layar komputer dalam waktu lama. Rekomendasi penelitian adalah peningkatan kualitas jaringan internet, adanya belajar mandiri dan pemberian tugas sebelum pembelajaran daring, memasukkan materi studi kasus sebagai bahan diskusi, dan menambah materi belajar berupa video (bukan hanya dokumen).

**Kata Kunci:** Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pembelajaran Jarak Jauh, Quasi Eksperimen.

**Abstract**

*Administrator Leadership Training (PKA) is training for ASN Echelon III which aims to improve leadership performance competencies. Based on the Decree of the Head of the Financial Education and Training Agency (BPPK) No. 82 of 2020, BPPK can conduct distance training as an alternative to learning. This study aims to analyze the implementation of remote PKA policies at the Ministry of Finance. The research method used is quasi-experimental. Collecting data through distributing questionnaires to 26 training participant respondents from various regions (different time zones), then analyzed inductively. The results show that online learning methods make the learning process more productive because learning activities are varied and documented, time and place are flexible, budget allocations are much lower than offline learning. However, there were also several weaknesses, including the lack of social interaction between participants, interference that could occur due to unstable internet networks, and participants feeling tired because they had to sit and stare at a computer screen for a long time. Research recommendations are to improve the quality of the internet network, have*



*independent study and assign assignments before online learning, include case study material as discussion material, and add learning material in the form of videos (not just documents).*

**Keywords:** *Administrator Leadership Training, Distance Learning, Quasi Experiment.*

## PENDAHULUAN

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur bahwa Pejabat Administrator setara dengan jabatan eselon III, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, pengalaman kepemimpinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator harus memiliki kualifikasi melalui pelatihan struktural kepemimpinan administrator. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, PKA adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat administrator. Peningkatan kompetensi kepemimpinan ini penting dilakukan agar dapat memenuhi standar kompetensi manajerial dan kepemimpinan bagi pejabat administrator. Agenda pembelajarannya meliputi: (1) Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme; (2) Kepemimpinan Kinerja, (3) Manajemen Kinerja; dan (4) Aktualisasi Kepemimpinan. Agenda pelatihan dilaksanakan selama 797 jam pelatihan atau setara dengan 91 hari dengan rincian: 31 hari pelatihan di tempat penyelenggaraan pelatihan, dan sisanya di instansi peserta. PKA dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal yang merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dan nonklasikal yang merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kompetensi manajerial mutlak diperlukan adanya pelatihan dan motivasi yang kuat dari peserta dan lembaga pelatihan (Idrus, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rostiawati (2020), pelatihan pegawai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemampuan manajerial yang mengarah kepada *good governance*, kesiapan menjalankan tugas, dan menunjukkan etos kerja yang lebih baik (Rostiawati, 2020). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), KEP-82/PP/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) di Lingkungan BPPK, BPPK selalu berkomitmen untuk senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan prima BPPK. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, pertimbangan efektivitas dan efisiensi, BPPK dapat mengembangkan pembelajaran dalam bentuk pelatihan jarak jauh sebagai alternatif pembelajaran. Pelatihan jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematis dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Media belajar pelatihan jarak jauh yang digunakan antara lain Kemenkeu *Learning Center*, *Whatsapp*, *Google Classroom*, *Line*, *Webex*, *Telegram*, *Microsoft Teams*, *Buku*, *Zoom*, *CD/DVD*, *Google Drive*, *Dropbox*, *Google Docs*, dan/atau *e-mail*.

Pegawai Negeri Sipil diharapkan mempunyai kinerja berkualitas serta bisa beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam mensukseskan

pembangunan dalam berbagai lini (Safiri 2021). Era revolusi industri 4.0, *Internet of Things* berperan penting dalam segala aspek, termasuk pendidikan karena banyak manfaat yaitu tidak terkendala jarak dan waktu, tetapi harus disiapkan dengan baik (Nugroho, 2019). Pelatihan jarak-jauh perlu memadukan pendekatan melalui daring dan luring atau *blended learning*. Pengajar perlu fleksibel dalam mengelola pelatihan menggunakan media pelatihan yang bervariasi seperti *WhatsApp*, video tutorial yang sederhana, dan pengelolaan waktu dikomunikasikan dengan peserta (Akhmadi 2020). Berdasarkan penyelenggaraan PKA daring di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, diketahui peserta PKA lebih banyak menyukai pelatihan daring dibandingkan dengan pelatihan klasikal, karena dapat dilakukan di mana saja, tidak perlu konsumsi dan akomodasi, tidak memerlukan *hardcopy* materi, tidak memerlukan ruang kelas khusus, penyelenggaraan pelatihan lebih sederhana dan hemat waktu, biaya dan tenaga (Sembiring, 2021).

Pelatihan Jarak Jauh PKA Angkatan I di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang adalah PKA pertama kali yang melaksanakan metode belajar daring di Lingkungan Kemenkeu. Pelatihan ini dilaksanakan untuk pejabat administrator yang sudah menduduki jabatan administrator yang setara dengan eselon III. Pesertanya terdiri atas 5 (orang) berumur 40-45 tahun (19 %), 15 orang berusia 46-50 tahun (58 %), dan 6 (enam) orang berusia 51-55 tahun (23 %). Peserta termuda berumur 41 tahun dan tertua berumur 54 tahun. Jumlah peserta laki-laki ada dua puluh dua orang (85 %), dan 4 (empat) peserta perempuan (15 %). Data profil peserta tersebut menggambarkan bahwa peserta sebagian besar bukan generasi milenial sehingga menarik untuk diteliti bagaimana mereka harus mengikuti pelatihan jarak jauh secara *online*. Penelitian ini merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan umpan balik peserta terhadap implementasi kebijakan PKA yang dilaksanakan secara daring di Kemenkeu dengan tujuan untuk memberikan saran rekomendasi agar pelatihan berikutnya menjadi lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan rancangan kuasi eksperimen-*post test* (Creswell 2012). Metode ini lazim digunakan di penelitian pendidikan, karena tidak memungkinkan untuk menggunakan eksperimen penuh. Quasi eksperimen mempunyai keunggulan karena dapat memanfaatkan kelompok atau kelas yang melaksanakan pembelajaran. Penelitian ini dilakukan pada PKA Angkatan I di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang dengan metode pelatihan jarak jauh pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 dan hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 26 orang. Data primer diambil melalui wawancara, observasi, dan kuesioner dengan pertanyaan terbuka (Patton 2015). Pertanyaan terbuka yang diajukan yaitu: apa kelebihan, apa kekurangan, dan apa saran perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya lebih dari satu, dengan pertimbangan bahwa peserta adalah pejabat administrator yang mempunyai pengalaman luas. Data yang terkumpul dianalisis secara logika-induktif yaitu proses berpikir yang menggunakan logika untuk memahami pola dan kecenderungan dalam data melalui tiga tahap yaitu pengkodean, mendeskripsikan karakteristik utama, dan menginterpretasikan data (Mertler 2017). Hasil penelitian disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebaran Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Keuangan Berdasarkan Lokasi dan Zona Waktu

Sebaran peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Keuangan berdasarkan lokasi dan zona waktu disajikan dalam

Tabel 1.

**Tabel 1. Sebaran Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kementerian Keuangan Berdasarkan Lokasi Dan Zona Waktu**

No	Propinsi	Kota/Kab	Zona Waktu	Jumlah		
1	DKI Jakarta	Jakarta	WIB	7		
2	Jawa Barat	Bogor	WIB	1		
3	Jawa Tengah	Surakarta	WIB	1		
4	Jawa Timur	Malang	WIB	1		
5	Kalimantan Tengah	Sampit	WIB	1		
		Palangkaraya	WIB	1	18	69%
		Pangkalan Bun	WIB	1		
6	Kepulauan Riau	Batam	WIB	1		
		Tanjung Balai Riau	WIB	1		
7	Nanggro Aceh Darussalam	Banda Aceh	WIB	1		
8	Sumatera Utara	Medan	WIB	2		
9	Bali	Denpasar	WIT	1		
10	Gorontalo	Marisa	WIT	1		
11	Kalimantan Timur	Samarinda	WIT	1		
12	Kalimantan Utara	Tanjung Selor	WIT	1	7	27%
13	Maluku	Ambon	WIT	1		
14	Sulawesi Barat	Mamuju	WIT	1		
15	Sulawesi Utara	Manado	WIT	1		
16	Papua	Jayapura	WITA	1	1	4%
<b>Jumlah</b>				<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan

Tabel 1, diketahui sebanyak 18 peserta atau 69% berada pada zona Waktu Indonesia Barat (WIB), artinya sama dengan zona waktu tempat dilaksanakannya pelatihan. Meskipun dilakukan secara daring, patokan waktunya adalah zona waktu tempat penyelenggaraan pelatihan dalam hal ini Balai Diklat Kepemimpinan Magelang yang berada dalam zona WIB. Sebanyak 7 peserta atau 27% yang berada di zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) harus mengikuti jadwal lebih lambat satu jam, dan 1 peserta atau 4% yang berada di zona Waktu Indonesia Timur (WIT) lebih lambat dua jam. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap waktu dimulainya kegiatan pelatihan, istirahat-sholat-makan, dan waktu berakhirnya pelatihan.

### Kelebihan Implementasi PKA secara Daring di Lingkungan Kementerian Keuangan

Peserta berpendapat PKA secara jarak jauh di Kementerian Keuangan memiliki 6 kelebihan (tabel 2). 16 peserta (29%) berpendapat proses belajar menjadi lebih produktif karena kegiatan belajarnya bervariasi dan terdokumentasi. Dokumentasi pembelajaran berupa rekaman video selama pembelajaran, diskusi melalui *WhatsApp Group*, dan *Google Spread Sheet*. 15 peserta (42%) PKA berpendapat sistem ini fleksibel karena tidak terikat tempat dan waktu, selain itu juga lebih efisien karena banyak anggaran yang dapat

dihapuskan, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, anggaran makan-minum, dan anggaran alat tulis kantor. Dari sisi peserta, terdapat peningkatan anggaran penggunaan kuota internet jika mereka tidak berlangganan *wi-fi*, atau anggaran ini bisa dibebankan pada masing-masing unit kerja atau menggunakan jaringan internet kantor karena pelatihan juga merupakan pekerjaan dinas. Pendapat ini berkaitan dengan pendapat 2 orang peserta (6%) bahwa pelatihan jarak jauh merupakan tuntutan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan zaman. Selain itu ada 3 (tiga) jawaban yang masing-masing dari 1 peserta (3%) bahwa pelatihan jarak jauh melatih kedisiplinan secara mandiri, meningkatkan imajinasi peserta, dan pembelajaran menjadi lebih aktif.

**Tabel 2. Kelebihan Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh PKA di Kemenkeu**

No.	Uraian	Jumlah	
1	Lebih produktif karena kegiatan belajarnya bervariasi dan terdokumentasi	16	44%
2	Fleksibel karena tidak terikat tempat dan waktu	15	42%
3	Sesuai tuntutan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan zaman	2	6%
4	Melatih kedisiplinan secara mandiri	1	3%
5	Meningkatkan imajinasi peserta	1	3%
6	Pembelajaran menjadi lebih aktif	1	3%
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang diolah (2020)

### Kelemahan Implementasi PKA secara Daring di Lingkungan Kementerian Keuangan

Kelemahan implementasi PKA secara jarak jauh di lingkungan Kemenkeu disajikan pada tabel 3.

**Tabel 3. Kelemahan Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh PKA di Kemenkeu**

No	Uraian	Jumlah	
1	Hubungan sosial sedikit berkurang	14	29%
2	Koneksi internet kurang stabil	14	29%
3	Badan dan mata lelah karena harus duduk dan menatap layar komputer dalam waktu lama	7	14%
4	Perlu urutan bicara karena sering terputus-putus dan tumpang tindih saat diskusi	4	8%
5	Perbedaan zona waktu menyulitkan waktu ISOMA	3	6%
6	Konsentrasi sering terganggu anggota keluarga atau teman kantor	3	6%
7	Sulit menyelesaikan tugas jika dikerjakan sendirian	2	4%
8	Kurang menguasai teknologi informasi	1	2%
9	Diskusi di WAG tidak fokus pada materi, bercampur dengan obrolan	1	2%
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan pendapat peserta, diketahui terdapat 9 kelemahan dalam metode pembelajaran jarak jauh di PKA. 14 peserta (29%) berpendapat hubungan sosial antar peserta sedikit berkurang, meski demikian kondisi ini memang tidak bisa dihindari karena pelatihan dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dimana *social distancing* merupakan suatu keharusan. 14 peserta (29%) lainnya berpendapat jaringan internet yang kurang stabil di masing-masing peserta akan mengganggu jalannya pelatihan. Kondisi ini juga tidak mudah dicarikan solusi karena kualitas jaringan internet di masing-masing daerah berbeda, sedangkan sebaran peserta sangat luas dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua. Terdapat 7 peserta (14%) yang berpendapat badan dan mata lelah karena harus duduk dan menatap layar komputer dalam waktu lama, kondisi ini juga dipengaruhi oleh usia peserta

yang tidak muda lagi. Untuk menyikapi hal ini, sebaiknya proses pelatihan dibuat variasi agar peserta dan pengajar tidak terlalu lama duduk dan menatap layar komputer. Alternatif yang dapat dilakukan adalah disiapkan materi pelatihan yang dapat diakses secara *asynchronous* (proses pembelajaran daring yang memberikan bahan ajar dan pengerjaan tugas tidak langsung), misalnya dalam bentuk video pembelajaran di Kemenkeu *Learning Center*.

Kelemahan berikutnya, terdapat 4 peserta (8%) yang berpendapat bahwa salah satu permasalahan sering diskusi interaktif sering terputus-putus dan tumpang tindih, karena gangguan koneksi internet, sehingga mereka menyarankan sebaiknya saat diskusi perlu ada urutan bicara atau melanjutkan diskusi melalui *chat room* dan/atau *google spread sheet*. Terdapat 3 peserta (6%) dari zona waktu WIT berpendapat bahwa perbedaan zona waktu menyulitkan jadwal istirahat-sholat-makan, karena ada perbedaan dua jam. Kondisi ini dapat diatasi dengan menyamakan zona waktu semua peserta pelatihan agar mudah mengatur jadwal. Terdapat 3 peserta (6%) yang berpendapat konsentrasi mudah terganggu oleh lingkungan sekitar pada saat proses belajar (baik dari teman di kantor maupun anggota keluarga di rumah). Kondisi tersebut dapat dikurangi dengan cara mengurangi waktu pembelajaran tatap muka menggunakan *zoom* dan menambah waktu pembelajaran non tatap muka. Terdapat 2 peserta (4%) yang berpendapat sulit menyelesaikan tugas jika harus dikerjakan sendirian, mereka berpendapat akan lebih baik jika dikerjakan kelompok. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara *break out room*, dibuat kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dengan mempertimbangkan waktu dan kasus yang didiskusikan. Terdapat 1 peserta (2%) yang berpendapat sistem daring sulit karena peserta kurang menguasai teknologi. Kondisi ini dapat diatasi dengan adanya pegawai yang bertugas membimbing mereka yang kesulitan tersebut. Terakhir, 1 peserta (2%) berpendapat bahwa diskusi di *WhatsApp Group* tidak fokus pada materi, bercampur dengan obrolan. Kondisi tersebut dapat diatasi agar diskusi lebih efektif dan terdokumentasi dikerjakan dalam *Google Spread Sheet*, *WhatsApp Group* hanya digunakan untuk media komunikasi saja.

### **Saran Perbaikan Pelaksanaan PKA secara Daring di Lingkungan Kementerian Keuangan**

Sebanyak 6 peserta (20%) menyarankan adanya peningkatan kualitas jaringan internet. Masukan ini sangat penting namun tidak mudah untuk diatasi karena jaringan internet bukan hanya jaringan internet pada Balai Diklat Kepemimpinan Magelang sebagai penyelenggara pelatihan, namun juga jaringan internet yang digunakan oleh peserta pelatihan tersebar sangat luas. Terdapat 5 peserta (17%) yang menyarankan adanya belajar mandiri dan pemberian tugas sebelum pembelajaran tatap muka. Saran perbaikan ini sangat bagus karena membuat peserta menjadi lebih siap sebelum tatap muka secara *online* dan dapat mengurangi waktu tatap muka yang juga menjadi keluhan peserta. Sebaiknya materi yang diberikan tidak hanya modul dalam bentuk *Portable Document Format (PDF)*, tetapi juga berupa video-video pembelajaran. Untuk itu sebaiknya Balai Diklat Kepemimpinan Magelang menginisiasi pembuatan video pembelajaran tersebut dan mengunggahnya di Kemenkeu *Learning Center* sebagai *Learning Management System* yang dimiliki BPPK. Demikian juga tugas-tugas, sudah diberikan dan dikerjakan sebelum tatap muka online, sehingga saat tatap muka *online* efektif digunakan untuk diskusi dan pendalaman materi. Saran ini berkaitan dengan saran agar ditambahkan materi studi kasus, pengajar memberikan tujuan pembelajaran dan referensi, dan dapat menjawab saran agar menambah waktu pelatihan dalam bentuk belajar mandiri, tidak perlu menambah waktu pembelajaran tatap muka. Semua saran perbaikan agar implementasi PKA secara jarak jauh di Kementerian Keuangan disajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2. Saran Perbaikan Implementasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator secara Jarak Jauh di Kementerian Keuangan**

No.	Uraian	Jumlah	
1	Peningkatan kualitas koneksi internet	6	20%
2	Ada belajar mandiri dan pemberian tugas sebelum pembelajaran tatap muka	5	17%
3	Tetap ada pembelajaran tatap muka langsung minimal satu pertemuan	5	17%
4	Waktu pembelajaran diatur secara detail kapan materi dan kapan diskusi	3	10%
5	Peserta tidak terlalu banyak	2	7%
6	Ada jeda setiap tiga puluh menit tatap muka <i>online</i>	1	3%
7	Boleh mengikuti pembelajaran dari <i>home base</i>	1	3%
8	Tidak diselenggarakan pada bulan Ramadhan	1	3%
9	Diberikan pelatihan penggunaan aplikasi yang digunakan	1	3%
10	Ditambahkan materi studi kasus	1	3%
11	Pemanfaatan media <i>online</i> disesuaikan berdasarkan kondisi peserta	1	3%
12	Penambahan waktu pelatihan	1	3%
13	Pengajar memberikan tujuan pembelajaran dan referensi	1	3%
14	Pengaturan waktu tatap muka <i>online</i> agar tidak terlalu lama atau diberikan istirahat setiap tiga puluh menit	1	3%
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang diolah (2020)

Terdapat 5 peserta (17%) yang menyarankan agar tetap ada pembelajaran tatap muka langsung minimal satu pertemuan. Saat ini saran ini belum dapat dilaksanakan karena masih ada pandemi Covid-19, selain itu tatap muka langsung dalam waktu pendek tidak efektif karena sebaran peserta yang sangat luas memerlukan waktu perjalanan yang lama. Namun, jika kondisi sudah normal, saran ini bagus untuk dilaksanakan yaitu dengan sistem *blended learning*, campuran antara tatap muka langsung dan tatap muka *online*, karena terbukti pembelajaran secara *online* mempunyai beberapa kelebihan dan efisien. Saran ini berkaitan dengan saran dari 3 peserta (10%) bahwa sebaiknya waktu pembelajaran diatur secara detail mengenai jadwal sesi materi sesi diskusi.

2 peserta (7%) yang menyarankan agar jumlah peserta tidak terlalu banyak. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator dalam Pasal 10 mengatur bahwa jumlah peserta dalam 1 angkatan berjumlah paling rendah 30 orang dan paling banyak empat puluh orang. Jika jumlah peserta tidak memenuhi ketentuan tersebut, tetap dapat diselenggarakan dengan persetujuan tertulis Kepala Lembaga Administrasi Negara. Adapun jumlah peserta yang mengikuti PKA ini hanya 26 peserta, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengurangi jumlah peserta.

Selanjutnya terdapat 1 peserta (3%) yang menyarankan agar PKA tidak dilakukan pada bulan Ramadhan, saran perbaikan ini tidak harus dilaksanakan karena puasa bukan berarti tidak harus bekerja. Ada juga peserta yang menyarankan agar pelatihan ini karena dilakukan secara *online* dan jarak jauh dapat diikuti dari *home base*. Saran ini menarik karena kebanyakan peserta bekerja tidak di *home base*, terpisah dengan keluarganya, seandainya diikuti dari *home base* selama jaringan internet bagus tidak ada masalah, bahkan bisa menghindari gangguan harus mengerjakan tugas lain jika diikuti dari kantor, padahal statusnya sedang mengikuti pelatihan. Ada peserta yang menyarankan waktu mengistirahatkan mata setiap tiga puluh menit tatap muka *online*, saran ini sangat bagus karena mengikuti pembelajaran *online* terlalu lama mengharuskan peserta maupun pengajar duduk dan menatap komputer dalam waktu lama, kondisi tersebut tidak bagus untuk kesehatan pinggang maupun mata. Sebaiknya memang ada waktu proses

pembelajarannya tidak harus duduk dan menatap komputer terlalu lama. Saran ini berkaitan dengan saran agar pelatihan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan usia peserta, dan diberikan pelatihan penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran *online*, misalnya bagaimana cara *share screen* untuk presentasi, menjadikan tayangan *power point* sebagai *background* saat presentasi menggunakan aplikasi *zoom*.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

PKA secara jarak jauh pertama di lingkungan Kemenkeu yang diikuti 26 peserta dengan sebaran daerah dari tiga zona waktu berbeda (WIB, WITA, dan WIT) memiliki kelebihan yaitu proses belajar dinilai menjadi lebih lebih produktif karena kegiatan belajarnya bervariasi dan terdokumentasi, fleksibel karena tidak terikat tempat dan waktu, dan lebih efisien karena banyak anggaran yang dapat dihapuskan, seperti anggaran untuk perjalanan dinas, anggaran makan-minum, dan anggaran alat tulis kantor. Sedangkan kelemahan PKA dengan sistem daring ini adalah adanya perbedaan zona waktu antar peserta sehingga mempengaruhi pengaturan jadwal kegiatan, minimnya hubungan sosial antar peserta, koneksi internet (baik dari peserta maupun penyelenggara) yang kurang stabil sering mengganggu jalannya pelatihan, serta badan dan mata lelah karena harus duduk dan menatap layar komputer dalam waktu lama. Agar pelatihan ini menjadi lebih baik peserta menyarankan peningkatan kualitas koneksi jaringan internet, adanya belajar mandiri dan pemberian tugas sebelum pembelajaran tatap muka agar tatap muka *online* menjadi efektif, dan penambahan materi studi kasus sebagai bahan diskusi.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan direkomendasikan agar Balai Diklat Kepemimpinan Magelang sebagai penyelenggara Pelatihan Jarak Jauh melaksanakan PKA secara *blended learning* agar lebih efektif. Selain itu, materi belajar sebaiknya juga ditambahkan dengan video-video pembelajaran. Oleh karena itu perlu inisiasi pembuatan video pembelajaran dan mengunggahnya di Kemenkeu *Learning Center* sebagai *Learning Management System* yang dimiliki BPPK.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada pimpinan dan jajaran Balai Diklat Kepemimpinan Magelang tempat penelitian ini dilakukan, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2020 yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian ini, dan *reviewers* yang telah membantu penelitian ini publikasi pada Jurnal Kebijakan Pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2020. "Distance Training Evaluation in Pandemy." *Jurnal Diklat Keagamaan* 14 (2): 136–44.
- Arikunto, Suharsimi. 2017. "Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research-CAR)." In , 2nd ed., 43. Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Fourth Edi. Boston: Pearson.
- Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-82/PP/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) di Lingkungan BPPK.
- Mertler, Craig A. 2017. *Action Research, Improving Schools and Empowering Educators*. Fifth Edit. California: SAGE Publications.



- Nugroho, Roman Andrianto Pangondian; Paulus Insap Santosa; Eko. 2019. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembelajaran Daring Dalam Revolusi Industri 4.0." In *Sainteks 2019*, 56–60. <https://seminar-id.com/semnas-sainteks2019.html>.
- Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods : Integrating Theory and Practice*. 4th ed. California: SAGE Publications, Inc.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Rostiawati, Enong. 2020. "Efektifitas Manajemen Kepemimpinan Dalam Menciptakan Good Governance." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4 (1): 59–69. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.965>.
- Safiri, Rachmat Bahmim. 2021. "Membangun Motivasi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Melalui Pembimbingan Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Informasi." *EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pengajaran* 1 (1): 84–91.
- Sembiring, Sri Mahendra Satria Wirawan; Helena Ras Ulina. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Daring." *Jurnal Inspirasi Pendidikan* 11 (1): 19–27.